

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1. Tinjauan Teori**

##### 1.1.1. Perencanaan Pajak

###### *1.1.1.1. Pengertian Perencanaan Pajak*

Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2013:18). Menurut Suandy (2011:7) perencanaan pajak merupakan langkah pertama dalam manajemen pajak. Pada tahap ini peraturan perpajakan dikumpulkan dan diteliti untuk dapat menyeleksi cara penghematan pajak yang akan digunakan. Tujuan perencanaan pajak disini adalah agar dapat membayar kewajiban pajak seminimal mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang sudah ada dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa definisi perencanaan pajak yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan strategi yang dilakukan wajib pajak untuk membuat kewajiban pajak menjadi seminimal mungkin dengan tetap dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah aturan yang ada. Perencanaan pajak yang baik harusnya diimbangi dengan pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan agar tidak mengarah pada upaya penggelapan pajak.

###### *1.1.1.2. Tujuan Perencanaan Pajak*

Tujuan perencanaan pajak yaitu untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dengan tidak melanggar undang-undang. Pajak merupakan 8riter pengurang laba, sehingga dengan adanya perencanaan pajak, laba setelah pajak dapat dimaksimalkan.

Namun, tujuan perencanaan pajak secara umum menurut Pohan (2013:21) adalah sebagai berikut:

- 1) Menimalisasi beban pajak terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak
- 3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- 4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
  - a. Mematuhi segala ketentuan, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan dan penjara.
  - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan, undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

#### *1.1.1.3. Manfaat Perencanaan Pajak*

Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan usaha untuk mencapai laba maksimal. Perencanaan pajak dilakukan tentunya untuk memberikan manfaat kepada perusahaan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan perencanaan pajak secara cermat menurut Pohan (2014:20) yaitu:

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai biaya yang dapat di efisiensi.
- 2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang dikelola secara tepat perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat untuk mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak.

- 3) Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau lambat yang mengakibatkan dikenakan denda atau sanksi.
- 4) Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan

#### 1.1.1.4. *Motivasi Perencanaan Pajak*

Secara umum, motivasi yang mendorong perusahaan melakukan perencanaan pajak adalah meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba setelah pajak. Menurut Suandy (2011:10) ada tiga unsur perpajakan yang mendasari motivasi untuk melakukan perencanaan pajak, yaitu:

##### 1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai tujuan yang akan dicapai dalam sistem perpajakan. Terdapat beberapa faktor yang mendorong untuk melakukan perencanaan pajak dari aspek kebijakan perpajakan, yaitu:

##### a. Jenis pajak yang akan dipungut

Terdapat banyak jenis pajak yang menjadi pertimbangan utama, baik pajak langsung maupun tidak langsung dan cukai, seperti:

- 1) Pajak penghasilan badan dan orang pribadi
- 2) Pajak atas keuntungan modal
- 3) Pajak atas impor, ekspor, bea masuk
- 4) Pajak atas undian/hadiah
- 5) Pajak atas sewa, bunga, royalty, deviden
- 6) Bea materai
- 7) *Capital transfer taxes/transfer duties*
- 8) Lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya

##### b. Subjek pajak

Subjek pajak meliputi subjek pajak orang pribadi dan badan usaha. Salah satu contoh perbedaan perlakuan perpajakan terhadap kedua subjek pajak tersebut yaitu terkait pembayaran deviden badan usaha kepada pemegang saham berbentuk badan usaha dan pemegang saham perorangan. Deviden yang diterima oleh perorangan dikenakan pajak final sebesar 10% sedangkan

deviden yang diterima pemegang saham badan usaha dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15%. Perbedaan perlakuan perpajakan tersebut yang mendorong perusahaan untuk merencanakan pajak dengan cermat agar beban pajak yang harus dibayarkan rendah, sehingga sumber daya perusahaan dapat digunakan pada tujuan lain.

c. Objek pajak

Adanya perbedaan perlakuan atas objek pajak yang hakikatnya sama secara ekonomis, akan mendorong dilakukannya usaha perencanaan pajak agar beban pajak minimal. Objek pajak merupakan basis perhitungan (*tax bases*) besarnya pajak, maka agar alokasi sumber dana optimal, manajemen akan melakukan perencanaan pajak yang akurat tidak lebih dan tidak kurang.

d. Tarif pajak

Penerapan *schedular taxation* membuat perencana pajak berusaha semaksimal mungkin agar dikenakan pajak yang paling rendah (*low bracket*). Bracewell dan Milnes dalam Suandy (2011:12) mengatakan bahwa semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena wajib pajak dapat menghindari 11 riter pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tariff pajak yang lebih rendah.

e. Prosedur pembayaran

Sistem *self-assessment* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem pembayaran tersebut mendorong wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik.

2. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Undang-undang perpajakan diikuti oleh ketentuan-ketentuan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Dirjen Pajak. Sering kali, undang-undang perpajakan bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan tersebut, karena telah disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hal itu mengakibatkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dengan menganalisis celah tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

### 3. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Indonesia sebagai negara berkembang masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan yang memadai. Luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang kurang efektif mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran antara aparat pajak dengan wajib pajak. Oleh karena itu, perusahaan terdorong untuk melakukan perencanaan pajak yang baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana.

#### 1.1.1.5. Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Berry Spitz, 1983 menyatakan dalam buku Pohan (2014:27) tahapan-tahapan yang harus ditempuh agar perencanaan pajak sesuai dengan yang diharapkan yaitu:

1) *Analysis of the existing data base* (menganalisis informasi yang ada).

Tahap pertama yaitu menganalisis semua komponen pajak yang berbeda dalam suatu proyek kemudian menghitung setepat mungkin beban pajak yang harus dibayar. Selain itu, perlu juga untuk memperhitungkan total penghasilan dan pengeluaran lain di luar pajak dari suatu proyek. Maka dari itu, manajemen yang bertanggungjawab dalam perpajakan di suatu perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor internal ataupun eksternal, seperti:

- a. Fakta dan relevan
- b. Faktor pajak
- c. Faktor nonpajak lainnya

2) *Design of the one or more possible tax plans* (membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak).

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut ini:

1) Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional

Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, setidaknya minimal dua negara yang ditentukan dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan pajak harus berada pada tahap pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan.

- 2) Pemeliharaan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut

Dalam negara perpajakan internasional memungkinkan untuk mendapatkan perlakuan khusus memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi negara-negara yang berbeda. Pertimbangan bisnis dan keunggulan pengenaan pajak perlu diperhatikan untuk menguji keunggulan.

- 3) *Evaluating a tax plan* (mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak).

Perencanaan pajak merupakan salah satu dari seluruh perencanaan yang dilakukan perusahaan. Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan pajak untuk melihat seberapa baik hasil dari pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai perencanaan.

- 4) *Debugging the tax plan* (mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak).

Rencana yang telah dilaksanakan harus dievaluasi agar perencanaan pajak dapat selalu dilakukan pada cara yang terbaik sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Berbagai rencana harus dibuat dan dibandingkan sebanyak mungkin untuk mendapatkan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Terkadang suatu rencana yang telah dijalankan ataupun belum perlu diubah sebab terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan (*up to date planning*) harus tetap dilakukan meskipun ada biaya tambahan yang dikeluarkan.

- 5) *Updating the tax plan* (memutakhirkan rencana pajak).

Perhitungan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaan yang dapat mempengaruhi komponen suatu perjanjian harus tetap dilakukan walaupun suatu rencana pajak dan proyek telah berjalan. Dengan memperhatikan perubahan ataupun perkembangan yang akan datang dapat mengurangi dampak yang merugikan dari adanya perubahan tersebut, dan juga ada kesempatan untuk mendapatkan manfaat yang potensial.

#### 1.1.1.6. Indikator Perencanaan Pajak

Pengukuran perencanaan pajak dalam penelitian ini menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yaitu menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan.

Ukuran efektivitas manajemen pajak yang dimaksud adalah ukuran efektivitas perencanaan pajak. Rumus *tax retention rate* adalah (Subramanyam & John, 2013):

$$\text{TRR } it = \frac{\text{net income } it}{\text{pretax income } it}$$

Keterangan:

*TRR it* = *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t

*Net income it* = laba bersih pada perusahaan i pada tahun t

*Pretax income (EBIT it)* = laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t

## 1.1.2. Manajemen laba

### 1.1.2.1. Pengertian Manajemen Laba

Informasi laba dalam laporan keuangan yang merupakan indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan sering menjadi target rekaya melalui tindakan oportunitis manajemen untuk melindungi dirinya dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga yang melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan. Tindakan oportunitis tersebut dilakukan dengan memilih kebijakan akuntansi tertentu, yang akibatnya jumlah laba dapat diatur sesuai dengan kebutuhannya. Perilaku manajemen dalam mengatur jumlah laba sesuai keinginannya dikenal sebagai tindakan manajemen laba.

Menurut Scott (2015:445) manajemen laba merupakan kebijakan akuntansi pilihan manajer serta tindakan nyata yang dilakukan oleh manajer sehingga mempengaruhi laba guna mencapai beberapa tujuan laba yang akan dilaporkan. Menurut Fisher dan Resenzwig dalam Sulistyanto (2008:49) manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang. Kemudian menurut Mulford dan Eugene dalam Harahap (2010:81) manajemen laba didefinisikan sebagai manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari sebenarnya. Sedangkan menurut Fahmi (2013) *earning management* (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai

dengan dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan *earning management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya. Berdasarkan definisi manajemen laba dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan tindakan oportunitis yang dilakukan manajemen dengan memilih kebijakan akuntansi tertentu agar jumlah laba dalam laporan keuangan dapat diatur sedemikian mungkin untuk mencapai tujuan tertentu.

#### 1.1.2.2. Teori yang Melandasi Praktik Manajemen Laba (*Agency Theory*)

Praktik manajemen laba yang dilakukan manajemen dilandasi oleh teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan merupakan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih *principal* (pemilik) menggunakan pihak lain atau *agent* (manajer) untuk menjalankan perusahaan (Aditama & Purwaningsih, 2014). Dalam teori keagenan, *principal* yaitu pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Sedangkan *agent* yaitu manajemen yang berkewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan *principal* kepadanya. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada *agent*. Wewenang dan tanggungjawab *agent* dan *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa motivasi tiap individu adalah untuk kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Begitu juga yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Pihak *principal* (pemilik) termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen atau kenaikan harga saham perusahaan. Kemudian *agent* (manajer) termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui peningkatan kompensasi.

Perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* inilah yang menyebabkan munculnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* karena ketidakmampuan *principal* mengawasi aktivitas *agent* dalam perusahaan. Sedangkan *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri,

lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki *agent* dan *principal* ini dikenal dengan asimetri informasi. Informasi yang dimiliki manajer lebih banyak, sehingga dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan manajer. Kemudian *agent* juga terdorong untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal* dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama informasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*.

#### 1.1.2.3. Motivasi Manajemen Laba

Sulistiawan et al. (2011:31) menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang mendasari manajemen untuk melakukan manajemen laba, di antaranya yaitu:

##### 1) Motivasi bonus

Bonus merupakan salah satu bentuk *feedback* atau evaluasi yang diberikan oleh pemegang saham atas kinerja manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Salah satu penilaian kinerja manajemen yaitu melalui jumlah laba yang dihasilkan. Semakin tinggi laba yang didapat, maka semakin besar juga bonus yang akan didapat oleh manajemen. Hal itulah yang dapat memotivasi manajemen untuk selalu meningkatkan performanya salah satunya dengan melakukan praktik manajemen laba.

##### 2) Motivasi utang

Utang merupakan salah satu aspek yang penting dalam kegiatan ekspansi atau pengembangan perusahaan. Manajemen perusahaan perlu menunjukkan performa yang baik dalam laporan keuangan agar kreditor bersedia untuk memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar. Selain untuk mendapatkan pinjaman, perusahaan juga berkewajiban menjaga rasio keuangan agar tetap berada di atas batas tertentu. Hal itulah yang dapat mendorong manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba.

##### 3) Motivasi pajak

Perusahaan sebagai wajib pajak tentu berkewajiban untuk membayar pajak, namun dalam jumlah yang seminimal mungkin. Sehingga perusahaan cenderung akan membuat laba fiskal yang rendah agar pajak yang harus

dibayar juga rendah. Kecenderungan ini yang memotivasi manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba agar laba fiskal lebih rendah tanpa melanggar undang-undang perpajakan.

4) Motivasi penjualan saham

Perusahaan akan menawarkan sahamnya kepada investor atau *Initial Public Offering (IPO)* dengan tujuan mendapat tambahan modal usaha maupun untuk mengembangkan usahanya. Proses penjualan saham ke investor akan direspon dengan baik apabila perusahaan penerbit saham (emiten) dapat menjual kinerja yang baik. Kinerja yang baik biasanya diukur melalui laba yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Kondisi yang seperti itu dapat memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba.

5) Motivasi pergantian direksi atau *chief executive officer (CEO)*

CEO yang mendekati akhir masa jabatannya cenderung akan memaksimalkan laba agar performa kerjanya terlihat baik untuk memperoleh bonus yang besar di akhir masa jabatannya. Keinginan untuk mendapatkan bonus besar itulah yang memotivasi manajer melakukan tindakan manajemen laba.

6) Motivasi politis

Pada aspek politis ini, manajer cenderung untuk melakukan manajemen laba dengan membuat laba lebih rendah. Hal ini dilakukan agar biaya politis perusahaan berkurang dan perusahaan tetap mendapatkan kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, seperti subsidi dan perlindungan dari pesaing luar negeri. Hal itu akan menguntungkan manajemen.

#### 1.1.2.4. Pola Manajemen Laba

Scott dalam Sulistiawan et al. (2011:40) menyebutkan pola yang sering digunakan dalam manajemen laba, yaitu:

1) Pola *taking a bath*

Pola ini mengatur laba tahun berjalan perusahaan menjadi sangat tinggi atau rendah dibandingkan periode sebelumnya atau tahun sebelumnya. Pola ini biasa digunakan pada perusahaan yang sedang dalam pergantian pimpinan, karena jika pada saat pergantian pimpinan dan perusahaan dalam kondisi yang tidak bagus atau mengalami kerugian, pimpinan yang baru akan mengambil

kesempatan untuk melaporkan kerugian yang lebih besar agar pada saat periode selanjutnya dapat melaporkan laba sesuai target. Pola ini dilakukan dengan melakukan penghapusan (*write off*) terhadap aset tertentu dan membebankan biaya-biaya periode mendatang ke periode tahun berjalan.

2) Pola penurunan laba (*income minimization*)

Pola penurunan laba merupakan upaya perusahaan untuk mengatur jumlah laba berjalan agar lebih rendah dari laba yang sebenarnya. Pola ini dilakukan dengan mengatur pendapatan agar lebih rendah dari pendapatan sebenarnya dan membebankan biaya periode mendatang ke periode tahun berjalan agar biaya lebih tinggi.

3) Pola kenaikan laba (*income maximization*)

Pola kenaikan laba merupakan upaya perusahaan untuk mengatur jumlah laba berjalan agar lebih tinggi dari laba yang sebenarnya. Pola ini dapat dilakukan dengan melaporkan biaya-biaya periode berjalan ke periode mendatang, meningkatkan penjualan, dan pemilihan metode akuntansi yang dapat menaikkan jumlah laba tahun berjalan.

4) Pola pemerataan laba (*income smoothing*)

Pola pemerataan laba merupakan upaya perusahaan untuk mengatur jumlah laba berjalan agar relatif stabil dalam beberapa periode. Pola ini dapat dilakukan dengan menjaga stabilitas laba melalui kombinasi antara melakukan pola menaikkan laba dan menurunkan laba.

#### 1.1.2.5. Teknik Manajemen Laba

Secara umum, menurut Wolk, Dodd, dan Tearney dalam Sulistiawan et al. (2011:40) teknik manajemen laba dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1) Mengubah metode akuntansi

Metode akuntansi merupakan beberapa pilihan untuk menilai aset perusahaan yang disediakan oleh standar akuntansi (*accounting choices*). Pemilihan metode akuntansi akan memberikan dampak yang berbeda baik untuk manajemen, pemilik, maupun pemerintah. Hal itu menyebabkan adanya konflik kepentingan antara ketiganya. Pemilihan metode merupakan bentuk

maksimalisasi nilai perusahaan selama pemilihan tersebut sesuai dengan aturan dalam SAK. Beberapa bentuk pilihan metode akuntansi yaitu:

- a. Metode penilaian persediaan (*first in first out-FIFO, last in First Out-LIFO*, rata-rata tertimbang, atau identifikasi khusus)
- b. Metode penyusutan aset tetap (garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, atau unit produksi)
- c. Pengakuan pendapatan (metode persentase penyelesaian, saat penjualan, dan saat penerimaan kas)

## 2) Membuat estimasi akuntansi

Estimasi akuntansi perlu dibuat dengan tujuan menambah atau mengurangi laba akuntansi. Pembuatan estimasi akuntansi disesuaikan dengan keperluan penyajian laporan keuangan. Jika menginginkan laba tinggi, bentuk estimasi akuntansi yaitu seperti:

- a. mengubah estimasi umur ekonomis aset tetap atau aset tidak berwujud menjadi lebih panjang. Sehingga beban penyusutan lebih besar dan mengakibatkan laba lebih tinggi.
- b. membuat estimasi dalam menentukan besarnya piutang tak tertagih berdasarkan persentase piutang daripada persentase penjualan. Hal itu dilakukan karena persentase penjualan termasuk dalam kebijakan *matching principle*, yaitu prinsip akuntansi yang akan mengakui pendapatan dan beban pada periode yang sama. Sehingga akan manajer akan kesulitan dalam mengatur jumlah laba akuntansi periode berjalan melalui penangguhan atau percepatan atas pendapatan dan beban.

## 3) Mengubah periode pengakuan pendapatan dan biaya

Teknik ini dilakukan dengan cara mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan dan biaya. Jika mengharapkan laba maksimum, pendapatan periode mendatang diakui pada periode tahun berjalan. Sedangkan biaya tahun berjalan diakui pada periode mendatang.

### 1.1.2.6. Indikator Manajemen Laba

Pengukuran manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model berbasis *aggregate accrual*, yaitu model yang digunakan untuk mendeteksi

aktivitas rekayasa dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model berbasis *aggregate accrual* dinilai sebagai model yang memberikan hasil paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba. Alasannya karena model ini sejalan dengan akuntansi berbasis akrual yang digunakan oleh dunia usaha dan model ini menggunakan semua komponen laporan keuangan dalam mendeteksi rekayasa keuangan. Pengukuran *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba menggunakan Model Jones Modifikasi yang dikembangkan oleh Dechow pada tahun 1995 (Sihombing et al., 2020). Model Jones Modifikasi merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan.

Langkah penggunaan model Jones modifikasi yakni sebagai berikut:

1. Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan. Rumusnya yaitu:

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flow\ from\ operations$$

2. Nilai total akrual yang diregresi linier sederhana atau *Ordinary Least Square* (OLS) dengan persamaan:

$$\frac{TAC}{A_{it-1}} = \beta_1 \left( \frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left[ \frac{(\Delta REV_{it})}{A_{it-1}} \right] + \beta_3 \left( \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + e$$

3. Dengan menggunakan koefisien regresi di atas, nilai *nondiscretionary accrual* (NDA) dihitung dengan persamaan:

$$NDA_{it} = \beta_1 \left( \frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left[ \frac{(\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})}{A_{it-1}} \right] + \beta_3 \left( \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + e$$

4. Selanjutnya, menghitung *discretionary accrual* (DA) dengan persamaan:

$$D_{ait} = \frac{TAC}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan:

TAC : Total akrual perusahaan i pada periode t

Net Income : Laba bersih perusahaan i pada periode t

*Cash flow from*

<i>Operations</i>	: Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan <i>i</i> pada periode <i>t</i>
<i>Dait</i>	: Discretionary Accruals perusahaan <i>i</i> pada periode <i>t</i>
<i>NDAit</i>	: Nondiscretionary Accruals perusahaan <i>i</i> pada periode <i>t</i>
<i>Ait-1</i>	: Total aset perusahaan <i>i</i> pada periode <i>t-1</i>
$\Delta REVit$	: Perubahan pendapatan perusahaan <i>i</i> pada periode <i>t</i>
<i>PPEit</i>	: Aset tetap perusahaan pada periode <i>t</i>
$\Delta RECit$	: Perubahan piutang perusahaan <i>i</i> pada periode <i>t</i>
<i>e</i>	: error

### 1.1.3. Ukuran Perusahaan

#### 1.1.3.1. Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham et al., (2010:4) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Kemudian Hartono Hartono (2008:14) mengatakan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan dapat diukur dengan total aktiva / besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Sedangkan menurut Hery (2017:3) ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur melalui total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan sebagainya. Aset yang semakin besar membuat modal yang ditanam semakin banyak, penjualan meningkat membuat perputaran uang meningkat, kapitalisasi pasar meningkat membuat perusahaan semakin dikenal masyarakat dan investor.

Ukuran perusahaan merupakan indikator penting dalam mengetahui aktivitas operasional perusahaan yang lebih kompleks dan memungkinkan untuk melakukan manajemen laba. Dalam penelitian ini, besar kecilnya suatu perusahaan dilihat dari total aset. Perusahaan besar biasanya memiliki beragam informasi yang lebih akurat daripada perusahaan yang lebih kecil. Sehingga, perusahaan besar dapat memiliki informasi lebih banyak dalam kegiatan pengambilan keputusan. Perusahaan yang besar juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pinjaman karena perusahaan besar cenderung

lebih mampu untuk menghasilkan laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya perusahaan melalui aset yang dimiliki perusahaan.

#### *1.1.3.2. Klasifikasi Ukuran Perusahaan*

Klasifikasi ukuran perusahaan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Satu ) adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”

Klasifikasi ukuran perusahaan dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu:

- 1) Klasifikasi ukuran perusahaan menurut Badan Standarisasi Nasional dibagi menjadi 3 jenis yang ditunjukkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1.1  
Kriteria Ukuran Perusahaan BSN

Ukuran Perusahaan	Kriteria (Rp)	
	Kekayaan Bersih	Penjualan Tahunan
Usaha kecil	≤ 200 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 1 Milyar
Usaha menengah	1 Milyar -10 Milyar (termasuk tanah dan bangunan)	>1 Milyar-50 Milyar
Usaha besar	>10 Milyar (termasuk tanah dan bangunan)	> 50 Milyar

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (Suffah & Riduwan, 2016)

- 2) Klasifikasi ukuran perusahaan menurut *Small Bussiness Administration* (SBA) yaitu:

Tabel 1.2  
Kriteria Ukuran Perusahaan SBA

<i>Small Bussiness</i>	<i>Employment Size</i>	<i>Assets Size</i>	<i>Sales Size</i>
<i>Family Size</i>	1-4	<\$100.00	\$100.00-500.00
<i>Small</i>	5-19	\$100.00 – 500.00	\$500.00-1 Million
<i>Medium</i>	20-99	\$500.00-5Million	\$1 Million-10 Million
<i>Large</i>	100-499	\$5-25 Million	\$10 Million-50 Million

Sumber: *Small Bussiness Administration* (Apriliani & Dewayanto, 2018)

- 3) Klasifikasi ukuran perusahaan dalam Pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-11/PM/1997, yaitu “Perusahaan Menengah atau Kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (*total assets*) tidak lebih dari Rp.100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah)”.

#### 1.1.3.3. Indikator Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan besarnya jumlah aset perusahaan. Begitu juga dalam penelitian ini menggunakan logaritma dari total aset untuk mengukur besar kecilnya perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan

pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu (Harahap, 2007:23). Menurut PSAK Nomor 1 aset adalah segala manfaat ekonomi yang mengandung potensi dalam suatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat di ubah menjadi kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat proses produksi

Ukuran perusahaan (*Firm Size*) diukur dengan mentransformasikan total aset yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk algoritma natural (Murhadi, 2013). Tujuan proksi *log natural* total aset tersebut agar fluktuasi data yang berlebihan dapat dikurangi. *Log natural* dapat menyederhankan jumlah aset yang bernilai ratusan miliar hingga triliunan tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{total aset})$$

(Harahap, 2007:23)

## 1.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan referensi dari hasil penelitian terdahulu sebagai gambaran dalam melakukan penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat:

- 1) Nurianti Sihombing, Enggar Diah PA, Muhammad Gowon (2019) dengan judul Pengaruh *Tax Planning* dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel *Moderating* Pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018. Populasi penelitian ini yaitu pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018. Metode analisis data menggunakan analisis linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada variabel independen perencanaan pajak, variabel dependen manajemen laba, variabel moderasi ukuran perusahaan, dan teknik analisis menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen profitabilitas yang tidak diuji dalam penelitian yang akan penulis lakukan.

- 2) Andri Waskita Aji, Fitri Fahmi Atun (2019) dengan judul Pengaruh *Tax Planning*, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). Populasi penelitian ini yaitu 141 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dan sampel yang diperoleh sebesar 55 perusahaan menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis data menggunakan analisis linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada variabel independen perencanaan pajak, variabel moderasi ukuran perusahaan, dan teknik analisis menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen profitabilitas dan likuiditas, serta variabel dependen nilai perusahaan yang tidak diuji dalam penelitian yang akan penulis lakukan.
- 3) Dea Savitri Ayu Lestari, Ia Kurnia, Yuniati (2018) dengan judul Pengaruh Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). Populasi penelitian ini yaitu pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Metode analisis data menggunakan analisis linear berganda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada variabel independen perencanaan pajak dan variabel dependen manajemen laba. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini merupakan variabel independen.
- 4) Enong Muiz, Heni Ningsih (2018) dengan judul Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba. Populasi penelitian ini yaitu pada perusahaan manufaktur sub sector otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2017. Metode analisis data menggunakan analisis linear

berganda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada variabel independen perencanaan pajak dan variabel dependen manajemen laba. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial dalam penelitian ini merupakan variabel independen populasi yang digunakan.

- 5) Fitri Islamiah & Apollo (2020) dengan judul Pengaruh Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. Populasi penelitian ini yaitu pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Metode analisis data menggunakan analisis linear berganda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada variabel independen perencanaan pajak dan variabel dependen manajemen laba. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel ukuran perusahaan dan leverage dalam penelitian ini merupakan variabel independen dan pada populasi yang digunakan.
- 6) Tutik AvriniaWulansari (2019) dengan judul Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. Populasi penelitian ini yaitu pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Metode analisis data menggunakan analisis linear berganda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada variabel independen perencanaan pajak dan variabel dependen manajemen laba. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel ukuran perusahaan dan beban pajak tangguhan dalam penelitian ini merupakan variabel independen dan pada populasi yang digunakan.
- 7) Dhea Pranatania Puspitasari dan Sri Murdiati (2018) dengan judul Pengaruh Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Asset Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. Populasi penelitian ini yaitu pada perusahaan manufaktur sektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis

regresi linier berganda, uji signifikansi simultan (uji 27riteria27 f), uji signifikan parameter individual (uji 27riteria27 t), koefisien determinasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada variabel independen perencanaan pajak dan variabel dependen manajemen laba. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen pajak tangguhan dan asset perusahaan, yang tidak diuji dalam penelitian yang akan penulis lakukan.

- 8) Sylvia, Puspahadi Boenjamin, Susi Dwi Mulyani (2016) dengan judul Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan *Debt To Equity Ratio* Terhadap Praktik Manajemen Laba. Populasi penelitian ini yaitu pada perusahaan manufaktur *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Metode analisis data menggunakan analisis linear berganda, 27riteria27 deskriptif, uji asumsi klasik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada variabel independen perencanaan pajak dan variabel dependen manajemen laba. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen beban pajak tangguhan dan *debt to equity ratio* yang tidak diuji dalam penelitian yang akan penulis lakukan.
- 9) Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih (2014) dengan judul Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini yaitu pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Metode analisis data menggunakan analisis linear berganda dan 27riteria27 deskriptif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada variabel independen perencanaan pajak dan variabel dependen manajemen laba

Tabel 1.3  
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Hasil
1	Nurianti Sihombing,	Pengaruh <i>Tax Planning</i> dan	1) Secara parsial bahwa <i>tax planning</i> berpengaruh

	Enggar Diah PA, Muhammad Gowon (2019)	Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel <i>Moderating</i> Pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018	<p>terhadap manajemen laba. Sedangkan,</p> <p>2) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.</p> <p>3) Secara simultan, <i>tax planning</i> dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba.</p> <p>4) Berdasarkan hasil uji interaksi <i>MRA</i>, ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh <i>tax planning</i> terhadap manajemen laba,</p> <p>5) namun tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba.</p>
2.	Andri Waskita Aji, Fitri Fahmi Atun (2019)	Pengaruh <i>Tax Planning</i> , Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)	<p>1) Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</p> <p>2) Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.</p> <p>3) Variabel likuiditas memiliki pengaruh 28riteria terhadap nilai perusahaan.</p> <p>4) Perencanaan pajak memiliki efek 28riteria yang tidak diperkuat dengan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.</p> <p>5) Profitabilitas berpengaruh positif pada nilai perusahaan dan ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat hubungan keduanya.</p> <p>6) Likuiditas diperkuat oleh ukuran perusahaan berpengaruh 28riteria terhadap nilai perusahaan.</p>
3.	Dea Savitri Ayu Lestari, Ia	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Ukuran	1) Secara simultan perencanaan pajak dan

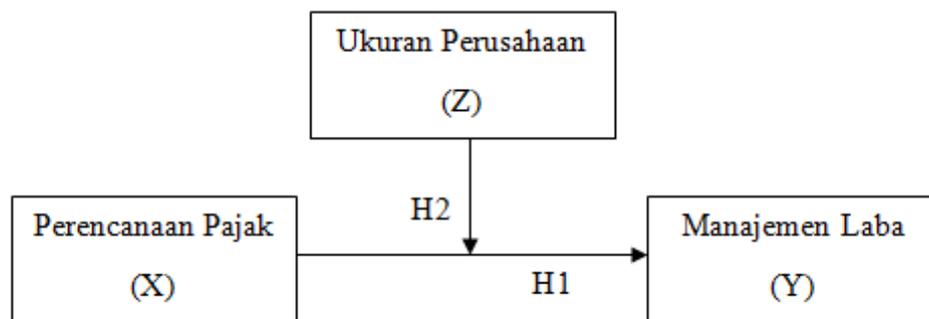
	Kurnia, Yuniati (2018)	Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)	<p>ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.</p> <p>2) Secara parsial, perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p>3) Secara parsial, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba</p>
4.	Enong Muiz, Heni Ningsih (2018)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba	<p>1) Secara parsial perencanaan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>2) Kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p>3) secara simultan perencanaan pajak, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba</p>
5.	Fitri Islamiah & Apollo (2020)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Manajemen Laba	<p>1) perencanaan pajak, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba.</p> <p>2) secara parsial, perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan</p> <p>3) ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap</p>

			manajemen laba
6.	Tutik AvriniaWulansari (2019)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	1) Perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba
7.	Dhea Pranatania Puspitasari dan Sri Murdiati (2018)	Pengaruh Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Asset Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017	1) Secara simultan pajak tangguhan, perencanaan pajak dan aset perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 2) Secara parsial, pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, 3) Perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan 4) aset perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
8.	Sylvia, Puspahadi Boenjamin, Susi Dwi Mulyani (2016)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan <i>Debt To Equity Ratio</i> Terhadap Praktik Manajemen Laba	1) Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba. 2) Perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan dan 30riteria terhadap manajemen laba. 3) Debt to Equity Rasio berpengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba
9.	Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih (2014)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	1) Perencanaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba

### 1.3. Model Konseptual Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu perencanaan pajak sebagai variabel independen, manajemen laba sebagai variabel dependen, dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Model konseptual penelitian ditunjukkan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.1  
Model Konseptual Penelitian



#### 1.4. Pengembangan Hipotesis

##### 1.4.1. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Perencanaan pajak pada umumnya merupakan proses merekayasa usaha transaksi wajib pajak agar beban pajak yang harus dibayar menjadi seminimal mungkin, namun tetap dalam bingkai peraturan perpajakan (Lestari, 2018). Perencanaan pajak dikenal dengan *effective tax* yaitu seorang wajib pajak yang berupaya mendapatkan penghematan pajak (*tax saving*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai peraturan perpajakan (Sihombing et al., 2020).

Perencanaan pajak merupakan salah satu insentif pajak yang memengaruhi perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Hubungan antara perencanaan pajak dengan manajemen laba dapat dijelaskan melalui teori agensi. Perencanaan pajak muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan berupaya untuk membayar pajak seminimal mungkin agar tidak mengurangi laba yang diperolehnya, sedangkan pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang tinggi dari perusahaan untuk mendanai pengeluaran negara.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan mencari tau apakah suatu kejadian atau transaksi memiliki dampak perpajakan. Selanjutnya, apabila suatu transaksi berdampak pada pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya serta ditunda pembayarannya. Salah satu langkah dalam perencanaan pajak yaitu dengan mengatur seberapa besar jumlah laba yang akan dilaporkan sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba.

Hal itu didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sihombing et al., (2020), Islamiah (2020), Wulansari (2019), Lestari et al., (2018) untuk menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Hal itu menunjukkan bahwa semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin tinggi juga peluang perusahaan melakukan praktik manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Perencanaan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Manajemen Laba

#### 1.4.2. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan dilihat dari total aset, total penjualan, dan sebagainya. Perusahaan besar cenderung memiliki total aset yang besar pula. Hal itu menyebabkan manajemen lebih leluasa dalam menggunakan aset tersebut untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga berdampak pula pada peningkatan laba perusahaan. Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah.

Pada umumnya perusahaan besar lebih banyak pertimbangan dalam melakukan perencanaan pajak. Perusahaan besar lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak karena semakin besar perusahaan, maka akan semakin diperhatikan oleh pihak fiskus. (Khairiyah & Herawaty, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan Muiz & Ningsih (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal itu sejalan dengan hasil penelitian Sihombing et al. (2020), yaitu ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Perencanaan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Manajemen Laba dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi